



PENDIDIKAN INDONESIA : RAMAI DI DAPUR, SEPI DI PANGGUNG (Sebuah Tinjauan Perkembangan)

Arif Hidajad

Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni UNESA Surabaya

hidajadarif@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidikan adalah pondasi sebuah bangsa. Pembentukan pola pikir, bertindak dan mengembangkan lingkungan diajarkan dan di transformasikan melalui dunia pendidikan. Sejarah pendidikan kita belum mempunyai pondasi kultural secara mandiri. Kurikulum yang berkembang belum bisa menghadirkan kebutuhan pembentukan karakter anak didik. Hal tersebut tidak terjadi dengan sendirinya, namun berkaitan dengan politik, ekonomi, dan arah pembangunan bangsa Indonesia.

Ditinjau dari sejarah, pendidikan Indonesia selalu mencari formulasi yang tepat. Ketepatan itu baru sebatas kebutuhan pembangunan dan tergantung arah politik pada saat itu. Konsep pendidikan menjadi tidak permanen dan selalu berubah. Dunia pendidikan kita selalu berkaca pada pola pendidikan diluar Indonesia. Padahal secara kultural bangsa tersebut sudah dulu berkembang dan melalui tahapan yang panjang. Sementara kemajuan jaman mendorong kita untuk instan, begitu juga konsep pendidikan yang diadopsi. Padahal secara sejarah kita bisa membuat konsep pendidikan dari keberagaman kultural yang ada. Tanpa harus tergesa menerapkannya dan butuh waktu. Pendidikan hendaknya bisa menjadi seutuhnya selain mencerdaskan juga membentuk manusia yang berkarakter. Pendidikan karakter adalah membentuk insan yang membumi dan tidak asing dengan lingkungannya sendiri. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi dokumen dan pustaka serta pengalaman selama menjadi pengajar.

Sebagai bangsa yang merdeka kita tentu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain. Selama ini kita selalu mengadopsi pola pendidikan kita dari luar yang tidak berakar dari akar budaya sendiri. Paling tidak kita sudah mempunyai dasar pijakan yaitu kebudayaan yang didalamnya mengandung pemngajaran tentang karakter.

Keyword: Pendidikan, konsep, sejarah



A. Pendahuluan

Masa krisis telah membawa banyak hikmah, kita telah banyak belajar dari masa lalu. Hikmah yang paling penting dari masa lalu tersebut adalah kebebasan berpendapat. Hakekat dari tuntutan demokratis itu adalah kebebasan untuk mencari kebenaran.

Kebenaran yang diperoleh bisa melalui banyak hal, sejarah, misalnya. Sejarah banyak memberikan suatu kebenaran yang faktual, namun kadang sesuatu yang faktual tidak selalu aktual. Sejarah sering dijadikan *apologi* untuk *legitimasi* sebuah kepentingan. Sehingga sejarah patut kita curigai sebagai suatu alat, meski sejarah memberikan pengajaran yang memberikan pengalaman.

Masyarakat Indonesia baru yang dicita-citakan antara lain akan dibangun oleh manusia Indonesia sendiri, terutama oleh generasi muda sekarang. Namun masih menjadi pertanyaan kaitannya dengan sejarah perjalanan bangsa ini. Benarkah Indonesia dibangun oleh bangsa ini secara mandiri? Tentu bukan sesuatu yang sulit jika kita menengok sejarah perjalanan bangsa ini. Kita adalah bangsa yang mempunyai budaya tutur yang kental, hadirnya sebuah lembaga pendidikan merupakan hasil dari peristiwa akulturasi budaya Barat. Budaya Barat mempunyai budaya tulis yang kuat, ini terbukti dengan banyaknya proses penciptaan ilmiah dari sana, bahkan teori tersebut masih digunakan. Peristiwa tersebut juga tidak terlepas dari situasi politik global yang terjadi pada awal negara ini dibangun oleh *founding father*. Mereka mencita-citakan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Namun masih juga menjadi pertanyaan benarkah setelah terbentuk lembaga pendidikan akan terbentuk manusia Indonesia seutuhnya, dan mandiri? Sementara ini kita masih dianggap sebagai negara dunia ketiga, Negara yang baru berkembang, Negara yang masih membutuhkan banyak hal. Kenyataan yang demikian tidak disadari, merupakan lahan

subur bagi berbagai kepentingan. Suatu negara yang adil makmur namun sebagian masih juga tergantung modal asing dari banyak sisi.

Paradigma baru dunia sekarang yang antara lain mendorong masyarakat dan individu yang kompetitif serta dapat bekerjasama, dan didorong oleh sikap inovatif. Paradigma beserta globalisasi yang sebenarnya secara nilai sangat merugikan tatanan nilai tradisi. Kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa modernitas adalah segala produk dan pemikiran Barat adalah bentuk modern, menjadikan sesuatu yang berbau tradisi menjadi termarginalkan. Baik produk, nilai maupun hakekatnya. Kesalahtafsiran pandangan dunia berakibat ketertinggalan teknologi dan nilai.

Situasi diatas merupakan gambaran yang terjadi saat ini, *chaos culture* menjadikan kita kebingungan, dimana kita berdiri? Mengapa kita berlari? Dan peradaban macam apa yang akan kita tuju nanti? Muara dari persoalan tersebut bisa kita runtut dari sejarah. Kalau Negara merupakan lembaga yang mewadahi suatu bangsa, maka politiklah yang menjadi alat mengatur antara kekuasaan, alat kekuasaan, daerah yang dikuasai, dan siapa yang dikuasai. Keduanya merupakan alat legitimasi untuk menghasilkan produk masyarakatnya. Alat itu bisa berupa pola pikiran yang dihasilkan dari *policy* yang dihasilkan. Kebijakan dari produk penguasa tertentu sangat menentukan kemana arah bangsa ini dituju. Pola pikir terbentuk dari adanya proses pembiasaan, proses tersebut dihasilkan bisa melalui lingkungan, maupun lembaga yang sengaja dibentuk. Pandangan politik penguasa yang berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan akan mempengaruhi pembiasaan tersebut. *Euforia* modernitas bersama perangkat yang menyertainya,



bukan berarti tidak membawa sesuatu tatanan nilai yang berakibat bagi pola tatanan kehidupan bangsa ini. Kepesatan arus informasi dan dunia tanpa batas dengan kotak ajaib sebagai hasilnya memepercepat juga sisi lain yang mau tidak mau hilang. Kadang kita terlupa bahwa apa yang kita jadikan panutan atau kiblat tidak sama dengan apa yang diharapkan. Negara Barat tentu berbeda dengan dunia kita. Dunia kita dibentuk dengan untaian nilai dan berdasarkan tatanan nilai yang sudah mendarah daging, artinya bangsa ini mempunyai akar budaya yang jelas. Dunia Barat tidak selalu mempunyai akar budaya yang jelas. Dan sekarang baru membangun tatanan nilai baru di segala bidang. Lalu kemana peradaban bangsa ini mau dibawa?

B. PEMBAHASAN

Dalam sejarah perjalanan bangsa kita ini, ada beberapa tahap yang bisa kita runut dari berbagai sumber sejarah. Kita mencoba membaginya menjadi 5 tahap termasuk dalam polarisasi pendidikan yaitu:

1. Masa pra kemerdekaan
2. Masa kebangkitan
3. Masa kemerdekaan
4. Masa Orde baru
5. Masa reformasi.

Masa-masa tersebut merupakan dinamika perjalanan yang tidak terlepas dari pengaruh manusia sebagai pelakunya. Kebijakan yang dihasilkan juga berbeda dalam banyak segi. Arah kebijakan politik dan kepentingan pada saat dekade yang berbeda.

1. Masa pra Kemerdekaan

Masa ini adalah masa otoritas wilayah yang terdiri dari wilayah budaya dan etnografi yang mandiri. Segala kebijakan yang dihasilkan menurut kebijakan perseorangan, atau raja yang berkuasa secara *absolute*. Di bidang pendidikan, hanya keturunan bangsawan saja yang boleh mengenyamnya, termasuk belajar

keluar dari wilayah kekuasaannya. Salah satu yang bisa mengimbangi secara tatanan nilai adalah, mereka juga diwajibkan mempelajari kesenian dan menciptakannya sebagai bentuk legitimasi kekuasaan. Penyebaran pendidikan pada masa itu sesuai dengan misi penyebaran agama serta cara hidup yang *universal*. Penyebaran pola pemikiran luar masih sangat terbatas. Hidup berdasarkan tatanan nilai yang disepakati masih bisa dijalankan dan didukung masyarakatnya. Warna pendidikan menjadi beragam, pengaruh agama Hindu, Budha, Islam memperkaya khasanah pendidikan pada saat itu. Bahkan banyak pendeta dari Cina sebelum mendalami kitab di India, harus belajar dulu di kerajaan Sriwijaya (Agus Salim, 2004,218). Pada waktu selanjutnya banyak pedagang Gujarat yang akhirnya bertempat tinggal dan menyebarkan agama Islam. Kemunculan wali songo tidak terlepas dari persoalan tersebut. Banyak ilmu dikembangkan pada saat itu, sastra, seni, pertanian, arsitektur . Pendidikan dilakukan secara turun temurun. Pendidikan diberikan terbatas, di padepokan yang diasuh oleh beberapa guru/pendeta dalam satu kelompok terbatas. (Sugeng Haryadi,2004, 260)

2. Masa Kebangkitan.

Masa ini terjadi sebenarnya terjadi jauh sebelum tahun 1908, kemerdekaan dan kesadaran akan berbangsa secara mandiri masih menjadi wacana terbatas. Kehadiran organisasi Budi Utomo sebagai wadah yang menjadi lokomotif penyadaran melalui media dan pemikiran yang dihasilkan. Berkembangnya sekolah yang dikelola oleh pihak kolonial Belanda membawa wacana puitika Barat. Pendidikan bagi pribumi hanya mempersiapkan tenaga terampil yang dapat dipekerjakan untuk usaha pihak kolonial. (Agus Salim,2004,238). Banyak kepentingan sebagai acuan



pengembangan peradaban Barat di wilayah jajahannya. Banyak juga tenaga kerja yang diambil oleh pihak kolonial dalam jumlah yang besar, dari Cina dan India, untuk mengembangkan usaha dagang dan ekonomi. Tenaga yang dihadirkan sebagai tenaga kasar. Sistem pendidikan tertutup diterapkan oleh Belanda, yaitu tertutup untuk keturunan bangsawan. Pendidikan ini hanyalah sebagai usaha Belanda untuk pelestarian *status quo*, dimana pendidikan hanya dijadikan semacam *training* bagi anak bangsawan untuk kemudian menjadikannya kepanjangan tangan dari Kolonial. Masyarakat di didik untuk menjadi pelaksana setia, tidak didik untuk cerdas, pemikir, maupun konseptor. Bangsa Indonesia saat itu tidak mempunyai gerak sedikitpun untuk menentukan langkahnya sendiri. Pada tahun 1908 berdiri organisasi Budi Utomo sebagai bentuk akumulasi kaum muda yang memperoleh pendidikan Barat di berbagai lembaga pendidikan. Mereka mempunyai citra pergaulan yang luas, melintasi batas wilayah kedaerahan, etnis, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Tokoh yang berdiri dibelakang organisasi tersebut diantaranya Sutomo dan teman-temannya merupakan produk yang dihasilkan oleh pola pendidikan Barat. Disamping beberapa warga keturunan yang membantunya. Perjuangan pada saat itu diorientasikan kepada ke-Ekaan daripada Ke-Bhinekaan. Tanpa memandang perbedaan kultural yang menjadi kenyataan geografis pada saat itu. Pendidikan dijadikan hak yang bisa dijangkau oleh masyarakat seluas-luasnya, dengan mengarah kepada rasa kesatuan. Kenyataan perbedaan dinafikan. Negara Belanda memang tidak terjadi dari berbagai macam suku, menghargai hak tunggal manusia secara hakekat. Sistem politik yang berkembang di sana

memberikan kesadaran berbangsa. Perguruan Taman Siswa yang didirikan Oleh Ki Hajar Dewantara, merupakan satu-satunya yang menggabungkan konsep pendidikan humanis yang modern dan unsur tradisi dalam pendidikan Jawa. (Agus Salim, 2004, 243)

3. Masa Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, orang lebih percaya bahwa orang yang berilmu adalah orang yang mempunyai kelebihan dan kewibawaan. Pengalaman Sukarno dan Hatta dalam pendidikan dan berorganisasi menjadikan mereka dipercaya sebagai tokoh yang bisa mewakili untuk menyatakan kebebasan bangsa ini. Pergaulan Sukarno dengan tokoh Sarikat Islam, merupakan pendidikan politik. Proses transformasi pengetahuan yang terjadi sangat membentuk pola pikir Sukarno. Pandangan politik Sukarno yang berkembang dari pergaulan yang panjang dan gesekan sosial yang dibaca dan terjadi, tidak memandang pendidikan sebagai sesuatu tindakan untuk mencetak sumber daya manusia sebagai bahan pokok perkembangan bangsa, politik sebagai panglima. Namun agaknya pola pikiran sosial terutama pikiran Marx tentang manusia yaitu bahwa segala sesuatu harus bisa menyadarkan masyarakat tentang haknya. Teori-teori kognisi ciptaan Bruner (Connel, 1974) yang menekankan cara individu menekankan cara mengorganisasikan apa yang telah ia alami dan pelajari. Senada dengan itu Ausubel juga menekankan cara seseorang untuk mengorganisasi pengetahuan yang didapatnya. Kepiawaiannya Sukarno dalam orasi tidak lepas dari persoalan tersebut. Pada masa Sukarno, pembangunan cenderung pada pembangunan fisik, sektor pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Namun jaringan diperkuat dengan



membangun hubungan dengan negara lain. Dengan demikian, dia menerapkan metode psikologi sosial, yaitu mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial.

4. Masa Orde Baru.

Setelah Sukarno tumbang munculah sistem pemerintahan baru yang diberi label Orde Baru. Orde ini berencana melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen. Pada masa ini Ke-Ekaan masih menjadi persoalan pokok. Hubungan baik dengan blok barat, membuat tradisi ilmu atau tradisi tulis begitu menjadi fenomena. Wajib bebas buta aksara menjadi pembangunan bidang pendidikan menjadi prioritas utama. Ini bisa kita lihat pada GBHN yang secara garis besar bermakna, pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan individu baik jasmani maupun rohani agar mampu mengembangkan hidup dan kehidupan secara optimal diri, keluarga, dan masyarakat (Hasbullah, 2000). Nasionalisme digemborkan tidak hanya berupa jargon, namun dilakukan di segala sistem yang ada. Nasionalisme dalam pendidikan bertujuan memuliakan dan memelihara negara. Proses pendidikan dilaksanakan dan diselenggarakan suatu bangsa, dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan watak atau kepribadian bangsa, serta mencapai tujuan nasional. Sistem pendidikan yang berkembang dari sejarah bangsa yang bersangkutan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor dan sumber daya serta potensi yang ada dikalangan bangsa. Pada era orde baru ini, sekolah yang bersifat umum berkembang pesat, sekolah kejuaruan sebagai kebijakan bidang lain juga mengalami peningkatan. Sekolah yang berbasis agama berkembang dibawah naungan Departemen agama. Perang dingin yang terjadi pada saat itu berimplikasi pada

pola penyelenggaraan pendidikan. Suharto yang lebih cenderung ke Barat menggunakan pola pikir Barat, yaitu pola pikir dialektis logika sebagai landasan pola pendidikan nasional. Bahwa semua anak bangsa berhak atas pendidikan. Secara umum bangsa-bangsa yang sudah maju memberi kewajiban belajar bagi warganya lebih lama dibanding negara yang sedang berkembang. Di negara berkembang, prosentase peserta yang harus mendapatkan pendidikan, banyak, sedangkan sarana pendidikan terbatas, sehingga waktu untuk belajar dibatasi. Faktor antrian siswa wajib belajar yang banyak, dan anggaran yang terbatas, menjadikan waktu pendidikan formal dibatasi (sistem kredit semester) Masih melanjutkan kebijakan Sukarno, Suharto juga berkehendak untuk bisa memproduksi sendiri kebutuhan negara, mengolah sendiri sumber daya bangsa. Untuk membangun, pada jaman ini banyak didapatkan bantuan, atau lebih jelasnya pinjaman dari World Bank, IGGI, dan IMF. Bantuan itu menjajikan banyak peluang kepada tenaga terdidik, terutama tenaga ekonomi dan fisik. Repelita sebagai kebijakan pembangunan lebih diarahkan ke bidang fisik. Bantuan yang diberikan oleh lembaga asing tersebut tidak dengan tanpa syarat. Berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh Negara yang berkaitan dengan banyak hal harus mengacu kebijakan yang digariskan oleh pihak lembaga asing tersebut.

Pendidikan mandiri dibuka seluas-luasnya. Namun ketidakmerataannya proses perkembangan yang dihasilkan oleh kebijakan pembangunan segala bidang pada pemerintahan ini berakibat buruk. Keluasan yang diberikan bidang pendidikan berakibat kekuasaannya menjadi kritis. Paham dan aliran politik yang berkembang di Barat, dan metode pendidikan yang diadopsi membawa



dampak bagi kekuasaan. Suharto yang sedikit banyak masih mengguakan metode feodal, ditunjang dengan latar belakang militernya, dinilai tidak demokratis. Pengaruh perkembangan politik di luar bangsa ini turut mewarnai ketumbangan rezim Orde Baru.

5. Masa Reformasi

Setelah kejatuhan Orde Baru, banyak terjadi kegoncangan faham politik sehingga negara tidak kunjung stabil dalam menjalankan roda kenegaraannya. Isu globalisasi yang sebenarnya merupakan kepentingan di luar bangsa ini menjadikan bangsa ini seperti kehilangan arah. Demokrasi yang diadopsi dari luar tatanan nilai bangsa sendiri mengubah negara ini menjadi *chaos*. Reformasi yang makna sebenarnya adalah menata ulang menjadi bermakna mengubah total. Faham politik yang beragam memberikan ragam kepentingan, larut di dalamnya. Pada tataran wilayah pendidikan, pada era ini sudah mulai ada kesadaran bahwa negara ini tidak mungkin mengejar secara cepat ketertinggalan kemajuan sains dan teknologi di bagian dunia lain. Kekayaan yang paling besar dari bangsa ini adalah keragaman dan banyaknya wilayah budaya. Maka kemudian dimunculkan Seni Budaya sebagai ganti budi pekerti. Metode apresiasi dan ekspresi bermaksud mengolah kembali kepekaan rasa dan mengembalikan nilai manusia sebagai makhluk sosial dan kreatif dalam menghadapi kemajuan jaman. Kebijakan lokal yang lama ditinggalkan kembali dipahami dengan mengkaji ulang kesenian daerah, nasional, dan manca negara. Hal itu menjadi perlu agar bangsa ini dapat melahirkan sumber daya manusia yang membumi, artinya menjadi manusia modern namun tetap mempunyai roh nilai-nilai bangsa sendiri. Dengan demikian tidak kehilangan kepribadian atau karakter bangsa. Seni

budaya juga dipandang perlu sebagai penyeimbang dan pembentuk karakter, karena adat terbentuk dari sikap, sikap yang terjadi terus menerus melalui pembiasaan akan menjadi sikap. Sikap yang melekat akan menjadi watak. Kalau itu terjadi maka bangsa ini akan mempunyai kepribadian yang kuat. Pada masa orde baru hal itu tidak menjadi prioritas, karena budaya hanya menjadi komoditas pendulang devisa. Masa reformasi sebenarnya juga begitu, namun pengembangan metode perlahan sudah mulai dikembangkan, walaupun sudah cukup terlambat. Disadari atau tidak seni budaya merupakan *sense of balancing* perkembangan karakter. Karakter individu-individu tersebut akan membentuk watak bangsa. Kebebasan, sekarang bermakna kontras. Demokrasi seharusnya mengakui perbedaan dalam kebersamaan, menjamin kesamaan hak. Kesamaan hak untuk memerintah yang dilakukan secara bergilir tanpa memandang status ekonomi, sosial maupun intelektual (J.H. Rapar, 1988,88). Namun ada juga penganut paham demokrasi yang keliru, mereka berpendapat bahwa demi untuk kebebasan, maka setiap orang dapat hidup dengan kehendaknya masing-masing (J.H. Rapar,1988, 92). Pemahaman yang demikian terjadi pada masa pembentukan awal era reformasi. Mengharuskan orang lain sepaham, yang tidak sepaham berarti patut disingkirkan, mengharuskan perbedaan menjadi kesatuan yang buta.

Pendidikan seni ataupun seni pendidikan sebenarnya melatih orang untuk mempunyai *sense of sensibility*, atau peka terhadap lingkungan dan sesuatu diluar dirinya. Mengembalikan manusia pada kodrat sosial dan saling tergantung. Kesenian hakekatnya bertujuan sama dengan pendidikan, yaitu



memanusiakan manusia. Perbedaan media yaitu kebenaran ilmiah dan kebenaran alamiah. Kebijakan pola pikirpun saling mengisi, kearifan logika dan kearifan virtua l(Suzanna.K. Langer.2006. 10)

Dari uraian diatas dapat diambil disimpulkan bahwa politik selalu membawa aliran pemikiran. Aliran tersebut kadang tidak selalu sesuai dengan kondisi yang berlangsung. Kondisi tersebut bisa terjadi dari segi tatanan nilai, geografis, karakter masyarakatnya maupun kondisi negara.Negara Indonesia belum mandiri dalam bidang pendidikan, secara konsep selalu mengadopsi dari negara lain. Sehingga pola pendidikan di Indonesia belum bisa mandiri sesuai kebutuhan sumber daya manusia yang ingin dihasilkan. Hal ini terjadi karena berusaha menyesuaikan kondisi global yang kian mempersempit *geo politik* namun kurang memberikan ruang kepada pola pendidikan yang dihasilkan dengan konsep kebutuhan bangsa sendiri.

Bangsa ini terbiasa tergantung dengan negara lain, sehingga segala sesuatu termasuk pola pendidikannya mengarah pada kebijakan politik yang sedang berkuasa. Bahkan kadang belum bisa diterapkan didaerah Indonesia yang secara etnografi sangat beragam bentuk dan maknanya.Masing-masing mempunyai tatanan nilai yang harus terwadahi dalam polarisasi pendidikan di Indonesia.

Sebenarnya kita mempunyai landasan pendidikan yang kuat dan bisa dikembangkan, namun fungsi pada pemerintahan tidak maksimal. Menyatunya pendidikan dan kebudayaan, pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi rancu dilapangan, karena sudah ada Departemen Pariwisata. Artinya masih menggunakan budaya dan hasilnya sebagai komoditas dan industri saja. Padahal, kepribadian tidak bisa

dijual atau dibeli. Tujuan pendidikan merupakan gambaran falsafah hidup atau pandangan hidup bangsa. Membicarakan masalah pendidikan tujuan pendidikan berarti juga menyangkut sistem nilai atau norma dalam konteks budaya. Kepercayaan, religi, dan fiasfat serta ideologi juga akan mempengaruhi perkembangan dari tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan pula yang memberikan pandangan hidup. Proses transformasi ilmu dari yang dewasa kepada yang dianggap belum dewasa. Kekuasaan dan pendidikan merupakan keterkaitan politis ke mana arah bangsa ini dibawa. Karena dengan kekuasaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan menghasilkan kualitas sumber daya dan arah tujuan yang akan dituju bangsa ini. Kenyataan yang terjadi proese pembelajaran yang menyangkut pendidikan karakter sangat terbatas jamnya. Kasus mata pelajaran seni budaya yang harus mengajarkan materi seni rupa, ketrampilan, seni tari, seni musik, seni tari dan seni drama hanya dua jam pelajaran selama seminggu. Begitupun pendidikan agama juga hanya 2 jam selama satu minggu. Ini berarti pendidikan pembentukan manusia masih kurang untuk menananmkan tata nilai karakter bangsa. Pemebelajaran yang sifatnya logis analitik menjadi prioritas utama. Masa itu sudah jauh dilakukan bangsa lain, dan kita baru memulainya. Sementara belum secara keseluruhan kita siap untuk melakukannya. Pendidikan yang berakar dari dari kita harus kembali kita dudukan ke tempatnya. Konsep pendidikan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara sudah menerapkannya, namun demikian masih perlu kajian mendalam kaitanya dengan pengembangan selanjutnya. Pendidikan seni akan memberikan pendidikan secara jasmaniah dan rohaniah sesuai perkembangan lingkungan dimana



pendidikan dilaksanakan. Karenanya pendidikan seni atau ekspresi estetika bisa dijadikan dasar pendidikan, melalui pengembangan. Agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional membentuk manusia Indonesia seutuhnya. *'that art should be the basic of education'*, demikian kata Herbert Read mengutip thesis Plato (Tjejep R, 2000, hal 33-34). Sehingga pendidikan seni tidak hanya menjadi pelengkap, namun bisa diambil secara substansial dasar pendidikan seni di Indonesia. Bahwa ilmu tidak hanya mengajarkan cara berikir, namun jga membentuk manusianya untuk bersikap, berbuat, berlaku sesuai dengan kepribadian bangsa. Pada perkembangan global saat ini ada suatu yang dilematis yang sulit diakomodasi oleh pendidikan estetika. Di satu sisi ada keinginan yang kuat masyarakat untuk memahami budaya lokal, disisi lain hal tersebut belum bisa terwujud dalam pola pendidikan seni kita. Hal ini terjadi karena memang sejak awal pola pendidikan kita tidak bermuarakan kepada ke Bhinekaan, namun di dorong kepada ke Ekaan. Diakui atau tidak pola pendidikan negara kita dari awal masih terpolo oleh kolonial, sehingga saat kita lepas dari kolonialisme masih sibuk mencari formulasi yang tepat. Itupun orientasi para pemikir masih menjadikan dunia Barat sebagai tolok akur pijakan dan belum berani beranjak.

Sudah saatnya mencari formulasi pola pendidikan yang berbasis sumber daya budaya bangsa sendiri, tanpa menghilangkan sisi perkembangan lain di luar. Perkembangan politik secara global maupun lokal, dalam tataran kebijakan dan orientasi bangsa adalah dua sisi keping mata uang yang sulit dipisahkan. Keduanya berkaitan antara pandangan dunia dan karakter bangsa sebagai identitas, dan pandangan hidup. Karenanya

menemukan formulasi dasar pendidikan bangsa ini lebih utama untuk tetap mengedepankan perkembangan proses yang terjadi. Pendidikan pada dasarnya membentuk manusianya, manusia Indonesia yang berkepribadian Indonesia dengan pola dan caranya, dengan tatanan nilai normatif yang ada di dalamnya. Sehingga melahirkan sumber daya manusia yang modern tanpa meninggalkan karakter kebangsaannya. Muatan seni budaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan tidak hanya terdapat dalam satu mata pelajaran karena budaya itu sendiri meliputi segala aspek kehidupan. Dalam mata pelajaran Seni Budaya, aspek budaya tidak dibahas secara tersendiri tetapi terintegrasi dengan seni. Karena itu, mata pelajaran Seni Budaya pada dasarnya merupakan pendidikan seni yang berbasis budaya. Seni budaya yang diajarkan materinya harus membentuk karakter peserta didik dan mencerminkan kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Pendidikan seni budaya diberikan karena keunikannya. Unsur estetika dan etika yang terkandung dalam materinya tidak didapatkan di pelajaran lain. Pendidikan seni budaya membentuk manusia sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Karena pendidikan seni budaya dituntut untuk memberikan muatan lokal sebagai puncak formulasi etika dan estetika dalam bentuk produk seni dan budaya yang berkembang di daerah setempat. Pendidikan seni budaya bisa kita cermati belajar melalui seni dan belajar tentang seni. Kedua hal tersebut sebenarnya bisa menggunakan seni sebagai media pembelajaran dari mata pelajaran yang lain. Kesenian dan budaya daerah merupakan puncak-puncak nilai normatif yang terformulasikan dalam bentuk kesenian, cara pandang, dan cara



sikap pada laku seseorang. Etika dan estetika yang terlahir dari budaya kita sendiri itulah yang mungkin bisa kita jadikan awal untuk landasan pendidikan kita sebagai penyeimbang pola pendidikan di luar yang secara falsafah berbeda dengan kita. Pendidikan ekspresi estetika bisa menjadi penyeimbang dari kemajuan ilmu dan teknologi. Agar melahirkan generasi modern tapi tetap membumi. Memang sulit untuk menemukan formulasi pola dasar pendidikan di Indonesia yang beragam karakter dan bermacam paradigm. Paradigma yang berkembang seringkali tidak sesuai dengan persoalan tersebut. Ki hajar Dewantara mampu mengemasnya dalam sebuah pola pendidikan yang tetap membumi dengan ” *ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*”. Konsep tersebut mencerminkan posisi pendidik di pusaran waktu yang terus berjalan. Seiring kemajuan jaman sosok pendidik menjadi fasilitator saja, bukan kepada persoalan yang esensial yaitu transformasi ilmu pengetahuan dari yang tahu kepada yang belum tahu, dari yang tua kepada yang muda dan dari pengetahuan ke ilmu. Paradigma sekarang ilmu menjadi suatu yang sangat di agungkan, sementara pengetahuan hanyalah menjadi pelengkap dari proses keilmuan tersebut. Tarik ulur bidang pendidikan seni belum bisa menjembatani anatara ilmu dan seni budaya di Negara kita. Wayang merupakan produk kesenian asli kita, namun posisinya menjadi suatu yang abstrak, apakah masuk disiplin ilmu music dengan gamelanya, apakah tari dari unsur geraknya, atautkah drama dalam dialognya. Kesenian wayang bermakna leburnya tiga disiplin ilmu tersebut. Kenyataan yang terjadi wayang dimasukan dalam kelompok seni pertunjukan. Sedangkan semua yang dipertontonkan bermakna teater atau pertunjukan. Namun

tidak semua disiplin ilmu kesenian mau dikelompokan dalam teater, walaupun secara harafiah seni pertunjukan adalah teater. Karenanya menjadi sangat gamang, kampus-kampus yang memproduksi calon pengajar dalam hal ini Sendratasik. Masih kebingungan antara produk dan kenyataan di lapangan. Sendratasik kepanjangan dari seni drama, tari dan music. Ketiganya masih mencari bentuk dan konsep dalam pola dasar keilmuannya. Seni drama masih sedikit yang mampu menyelenggarakannya selain yang diajarkan adalah ilmu drama, sementara dilapangan yang dituntut adalah ilmu teater. Seni tari yang diajarkan adalah tari tradisional, namun yang dibutuhkan adalah Sendratasik. Musik yang dipelajari adalah totalitas music modern yang dikemas dalam pola pendidikan seni. Kemudian yang menjadi pertanyaan kemanakah sebenarnya Sendratasik mau dituju ?. Belum lagi pecahnya Sendratasik karena membentuk lingkaran sendiri sebagai reaksi dari keilmuan yang dipahami. Kalau seni sebagai ekspresi estetika dipercaya sebagai pola pendidikan *building character* maka seharusnya konsep pola pendidikan akan berakar dari kenyataan budaya kita. Bukankah seni dipercaya sebagai puncak nilai yang kemudian membentuk manusianya sebagai penyangga budayanya.

Seiring kemajuan jaman setelah globalisasi berjalan dan menuju milenia baru, konsep pendidikan kita tidak lagi beranjak dari kenyataan budaya kita sendiri, namun cenderung mengikuti arus dan belum ada penyeimbang yang tepat untuk untuk itu. Selalu semua perkembangan menyesuaikan perkembangan budaya di luar kebudayaan sendiri. Era industrialisasi melahirkan produk pola pendidikan untuk mengejar era pasar bebas yang dicanangkan,



Kemasan kesenian dari produk kesenian banyak aspek termasuk dalam ranah semakain membajiri muka dunia maya. pendidikan. Banyak seminar ilmiah dan Padahal pola kesenian kita pendekatanyapenelitian yang dilakukan belum juga bisa adalah pola langsung tanpa batas. Kalaumembedah kebuntuan yang terjadi dalam kesenian atau seni budaya merupakan polamelahirkan pola yang tepat bagi pola baru dalam pendidikan maka seharusnya pendidikan kita. Memang kita tertinggal untuk dilakukan secara menyeluruh tanpamengejar budaya literasi yang sudah memecahnya dalam pemahaman di luardilakukan lebih dulu oleh bangsa lain. Tetapi pemahaman bangsa ini. Derasnya aruskita juga mempunyai landasan yang kuat budaya baru di melinia ini membawa tajukdalam mengurai kelebihan bangsa sendiri.

baru dari tema yang sesungguhnya akan Terlalu ramai kita bicara tentang dibentuk. Kesenian dari hasil produkilmu pengetahuan, namun sedikit yang bisa budaya menjadi bagian terkecil daridisimpulkan dan bisa mencapai konsep dasar hiburan semata yang memenuhi duniapendidikan kita. Dari tuntutan perkembangan maya, bukan lagi sebagai mediasejarah bisa kita lihat bahwa kita terlalu lama pendidikan. Karena kesenian lebihdijajah, dan belum mampu melahirkan berfungsi sebagai pengisi waktu luang.paradigma baru cara pandang bangsa kita Dunia maya juga menjadi kutub negativesendiri, yang bersumber dari bangsa sendiri. bagi perkembangan kesenian itu sendiri. Sekelumit tulisan ini merupakan kegelisahan Surutnya penonton, yang lebih memilih yang menggelitik, agar menjadi catatan bagi sesuatu yang pragmatis, ekonomis dansaya dan mungkin kita semua.

instann, membuat kesenian sebagai media

pendidikan lambat laun kehilangan

penerusnya. Pola pendidikan yang **Refrensi**

dilakuakan adalah belajar melalui seni, dan

belajar tentang seni. Seni budaya memang AAM Jelantik, *Estetika: Sebuah Pengantar*, bukan satu satunya pilihan sebagai pola 1999, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, Bandung.

pendidikan namun paling tidak ada usaha Bliss, Joan., Martin Monk and Jon Ogborn. 1983. *Quatitative Data Analysis for Educational Research*. London: Croom Helm.

untuk mencoba membumikan kembali paradigma yang tepat dan mengolahnya menjadi produk yang bisa diadaptasikan dengan keadan geo budaya bangsa kita, sebagai ilmu pengetahuanyang mampu “ up whit character” bagi generasi yang akan Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Analisa Situasi dan Kondisi Pendidikan Untuk Semua Tahun 2002*. Jakarta: Sekretariat Forum Koordinasi Nasional.

dating. Memang kita tidak harus menolak perkembangan, namun paling tidak perkembangan ilmu pengetahuan itu yang justru digunakan sebagai alat pengembangan diri.

Dickie, George. *Aesthetics an Introduction*. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, Inc, 1971.

Hasbullah. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

C. KESIMPULAN

Dari uraian diatas bisa kita simpulkan bahwa kita belum mampu memperdayakan kemampuan sendiri dalam



- Hartoko, Dick. *Manusia dan Seni*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 198
- Isaac, Stephen & William B Michael. 1983. *Handbook in Research and Evaluation. Second Edition*. San Diego, California: Edits.
- J.H.Rapar. 1988. *Fisafat Aristoteles*. Jakarta: CV.Rajawali
- Johnson. E.B. (2000). *Contextual Teaching and Learning*. California: Corwin Press, Inc.
- Kennick. W.E. 1979. *Art and Philosophy Readings in Aesthetics*. New York: St.Martin's Press, Inc.
- Krathwohl, David R. 1998. *Methods of Educational & Social Science Research: An Integrated Approach*. New York: Longman.
- Liang Gie, 1976, *Garis Besar Estetik (Filsafat Keindahan)*, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Munib, Achmad, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Macgowan, Kenneth dan William Melnitz. 1955, *The Living Stage*, USA: Prentice Hall.
- Sugiharto, Bambang, 2013, *Untuk Apa Seni?*. Bandung: Matahari
- Lewis, J.Lowell. 1995. Genre and Embodiment: From Brazilian Capoeira to the Ethology of Human Movement, " dalam Cultural Antropology, 10(2), (hal.221-243).
- Willet, John. ed, 1974. *Brecht on theatre, The Development of An Aesthetic*. London: Methuen
- Mudyahardjo, Redja. 2001. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohendi R, Tjejep, 2000, *Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan*, STSI, Bandung.
- Salim, Agus. 2004. *Indonesia Belajarlah*. Semarang: Gerbang Madani.
- Susanne.K.Langer. 2006. *Problematika Seni*. Bandung .Sunan Ambu Press.
- Sutrisno, Muji, 1993. *Estetika: Filsafat Keindahan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sutjipto, Katjik, 1973, *Seni Rupa sebagai Alat Pendidikan*, sub Proyek Penulisan Buku Pelajaran, IKIP Malang.
- Rohendi R, Tjejep, 2000, *Kesenian Dalam Pendekatan Kebudayaan*, STSI, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20, tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standart Nasional Pendidikan*.